



PPKM Dicabut, Pemprov Ikut Kebijakan Presiden



MULAI PADAT: Wisatawan berlibur di kawasan Malioboro, Kota Jogja, kemarin (22/12). Presiden Joko Widodo mewacanakan akan mencabut PPKM pada akhir tahun ini.

JOGIA, Radar Jogja - Kondisi pandemi Covid-19 yang sudah melandai selama setahun terakhir ini, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) perihal pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun ini. Kabar ini ditanggapi positif Pemprov DJJ =



► Baca PPKM... Hal 7

PPKM Dicabut, Pemprov Ikut Kebijakan Presiden

Sambungan dari hal 1

Sekprov DJJ Kadamanta Bas-kara Aji mengatakan, pada prinsipnya daerah akan ikut melaksanakan kebijakan dari pusat. Sehingga daerah akan segera menerbitkan kebijakan penanganan Covid-19 di level daerah. Menurut dia, jika kebijakan pusat menanggapi ini sudah landai dan bisa dicabut PPKM tidak jadi persoalan bagi pemprov.

"Tentu nanti daerah akan koordinasi nanti akan ada kebijakan lokal," katanya ditemui di Kompleks Kepathihan Rabu (21/12).

Meski begitu, Aji belum bisa menjelaskan aturan detailnya terkait penerapan kebijakan pembatasan level lokal paska nanti pemerintah mencabut PPKM. Ini perlu dilakukan rapat evaluasi untuk menentukan

sektor-sektor mana saja yang perlu dilakukan pengetatan jika PPKM benar adanya dicabut pemerintah. Pemprov bersama pemkab dan pemkot akan melakukan evaluasi.

"Terutama mana saja yang proses itu harus kita kencangkan. Kita kan belum tahu dicabut PPKM-nya apakah nanti juga ada aturan lainnya kan. Pasti dengan dicabut itu bukan berarti tidak ada aturan lagi," ujarnya.

Kendati begitu, tren penambahan kasus positif Covid-19 di DJJ memang telah melandai. Sebelumnya, kasus positif di wilayah ini sempat melonjak dengan rata-rata penambahan lebih dari 100 kasus dalam sehari. Saat ini rata-rata penambahan kasus positif berkisar antara 20-30 kasus perharinya. "Sudah melandai, kita naik sedikit sebulán lalu tapi sekarang sudah

landai lagi," jelasnya.

Pun meski wacana pencabutan PPKM telah beredar, masyarakat tetap diminta untuk waspada terhadap penularan Covid-19. Sebab, penularan Covid-19 belum sepenuhnya berakhir.

"Tentu juga tidak ada larangan kan bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan proses," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD DJJ Biwara Yuswan-tana mengingatkan kembali masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan juga sebagai tindak lanjut akan ada 7 juta lebih orang yang bermobilitas di DJJ selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. "Pasti suatu saat akan turun di mal, obyek wisata entah itu di destinasi kuliner dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan interaksi," tuturnya. (wia/prs/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005